



Analisis Sinergi Pembinaan Teritorial Antara TNI dan Pemda Guna Mitigasi Resiko Stunting dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah

Lalu Hamsya Muda^{1*}, Rizal Musa Karim², Yulis Andreas Lorentius³, Jaka Lelana⁴

¹⁻⁴ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

Email: hamsyamudalalu@gmail.com^{1*}, rizalmusa4296@gmail.com², yulis44@yahoo.com³, jaklek78@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: hamsyamudalalu@gmail.com¹

Abstract. *The National Food Security Program in Central Lombok Regency plays a key role in enhancing regional food resilience and reducing stunting in West Nusa Tenggara. This study analyzes the synergy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and local government in addressing stunting risks and contributing to national food security. Using a descriptive qualitative approach, the research examines secondary data, program reports, and stunting prevalence indicators. The findings show a significant decline in stunting rates, though data fluctuations highlight the need for better integration and synchronization. The stunting mitigation approach combines nutrition interventions and local food security measures, such as balanced food programs, supplementary feeding, and nutrition education. The collaboration between TNI and the local government has been seen in initiatives like the Foster Parent Program for Stunting Children (BAAS), agricultural support, and land management. TNI's territorial role is crucial in reaching grassroots communities and promoting awareness of balanced nutrition. However, the synergy is not fully integrated, facing challenges like limited coordination, differing priorities, and inadequate beneficiary data integration. The study concludes that enhancing coordinated, area-based collaboration between TNI and local government is critical for improving stunting mitigation efforts and strengthening national food security. Policy recommendations include improving coordination, data systems, and optimizing TNI's role in sustainable nutrition and food security interventions.*

Keywords: *Central Lombok; National Food Security; Nutrition Interventions; Stunting Risk Mitigation; Territorial Development.*

Abstrak. Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan regional dan mengurangi stunting di Nusa Tenggara Barat. Studi ini menganalisis sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah dalam mengatasi risiko stunting dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji data sekunder, laporan program, dan indikator prevalensi stunting. Temuan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam angka stunting, meskipun fluktuasi data menyoroti perlunya integrasi dan sinkronisasi yang lebih baik. Pendekatan mitigasi stunting menggabungkan intervensi gizi dan langkah-langkah ketahanan pangan lokal, seperti program pangan seimbang, pemberian makanan tambahan, dan pendidikan gizi. Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah telah terlihat dalam inisiatif seperti Program Orang Tua Asuh untuk Anak Stunting (BAAS), dukungan pertanian, dan pengelolaan lahan. Peran teritorial TNI sangat penting dalam menjangkau masyarakat akar rumput dan meningkatkan kesadaran akan gizi seimbang. Namun, sinergi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, menghadapi tantangan seperti koordinasi yang terbatas, prioritas yang berbeda, dan integrasi data penerima manfaat yang tidak memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kolaborasi terkoordinasi berbasis wilayah antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan upaya mitigasi stunting dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan koordinasi, sistem data, dan optimalisasi peran TNI dalam intervensi gizi dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Kata kunci: Intervensi Gizi; Ketahanan Pangan Nasional; Lombok Tengah; Mitigasi Risiko Stunting; Pembangunan Wilayah.

1. PENDAHULUAN

Stunting tetap menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, karena dampaknya yang jauh melampaui aspek kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laksono, Wulandari, dan Adji (2024), stunting pada anak tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik mereka, tetapi juga berisiko menurunkan kemampuan kognitif dan produktivitas ekonomi di masa depan. Stunting yang terjadi pada masa kanak-kanak dapat memperlambat perkembangan tenaga kerja yang akan berimplikasi pada daya saing nasional dan ketahanan bangsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi kualitas generasi mendatang dan produktivitas nasional. Oleh karena itu, mitigasi stunting perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Dalam perspektif pembangunan nasional, stunting tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai isu multidimensional yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan, kemiskinan, pendidikan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting sebagai sentra produksi pangan, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan struktural seperti kondisi geografis lahan kering, keterbatasan infrastruktur irigasi, distribusi pangan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan aspek ketahanan pangan dengan intervensi gizi secara komprehensif.

Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung program gizi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Implementasi program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konsumsi melalui pendekatan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dalam konteks ini, ketahanan pangan berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mitigasi risiko stunting, karena ketersediaan pangan yang cukup harus diiringi dengan akses dan pemanfaatan pangan yang berkualitas di tingkat rumah tangga. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasi antar sumber data yang mengindikasikan perlunya penguatan integrasi program dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar penurunan tersebut dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan sebagai pendekatan strategis. Secara konseptual, sinergi merupakan proses kolaboratif yang integratif dan dinamis untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Menurut Stephen R. Covey (1989), sinergi adalah kombinasi berbagai unsur yang mampu menghasilkan keluaran yang lebih besar dibandingkan jika bekerja secara terpisah. Pandangan ini diperkuat oleh Charles Hampden-Turner yang menekankan bahwa sinergi merupakan proses integratif yang melahirkan nilai tambah melalui keterpaduan berbagai aktivitas. Selain itu, Najianti dalam Rahmawati dkk. (2018) menyatakan bahwa sinergi dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang bersifat rasional dan demokratis, sementara Darla K. Deardorff dan Mitchell Williams menjelaskan bahwa sinergi menghasilkan efek gabungan yang lebih besar dibandingkan kontribusi masing-masing pihak secara individual. Dengan demikian, sinergi menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya dalam upaya mitigasi stunting.

Dalam konteks pertahanan negara, sinergi tersebut relevan dengan konsep Pembinaan Teritorial (Binter) yang merupakan fungsi utama TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011, Binter bertujuan untuk menyiapkan, memberdayakan, dan memelihara potensi wilayah pertahanan melalui pembinaan wilayah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini menekankan kemandirian TNI dengan rakyat melalui komunikasi sosial dan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif ini, TNI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan militer, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang mampu menjangkau hingga tingkat desa. Peran ini semakin strategis ketika dikaitkan dengan upaya mitigasi stunting dan penguatan ketahanan pangan, di mana keberadaan aparat teritorial dapat mempercepat distribusi program, pendampingan masyarakat, serta peningkatan kesadaran gizi.

Lebih lanjut, pendekatan tersebut sejalan dengan Teori Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang memandang ketahanan bangsa sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Dalam konteks ini, stunting dan kerawanan pangan merupakan ancaman nonmiliter yang dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya berdampak pada ketahanan nasional. Oleh karena itu, upaya penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menyeimbangkan aspek kesejahteraan dan keamanan.

Konsep tersebut juga diperkuat oleh Teori Sistem Pertahanan Semesta yang menempatkan pertahanan negara sebagai tanggung jawab seluruh komponen bangsa secara

terpadu dan berkelanjutan. Dalam sistem ini, ancaman nonmiliter seperti krisis pangan dan masalah kesehatan dipandang sebagai bagian dari spektrum ancaman yang harus dihadapi secara kolektif. Dengan demikian, sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi stunting dan penguatan ketahanan pangan merupakan bentuk implementasi nyata pertahanan semesta di tingkat daerah.

Selain itu, pendekatan ini dapat dianalisis melalui kerangka strategi DIME (*Diplomatic, Informational, Military, Economic*) yang dikemukakan oleh Edward Hallett Carr (1939) dan dikembangkan dalam studi strategi modern. Dalam konteks ini, sinergi TNI dan Pemerintah Daerah mencerminkan integrasi berbagai instrumen kekuatan nasional, yaitu aspek militer melalui Pembinaan Teritorial, aspek ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan, serta aspek informasi melalui edukasi gizi dan komunikasi publik. Integrasi ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya merupakan isu sosial, tetapi juga bagian dari strategi nasional yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sinergi antara Pembinaan Teritorial TNI dan Pemerintah Daerah merupakan pendekatan strategis dalam mitigasi risiko stunting sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lombok Tengah. Namun demikian, kondisi yang ada menunjukkan bahwa sinergi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dan masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, sinkronisasi program, serta integrasi data. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk, efektivitas, serta strategi penguatan sinergi tersebut guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sinergi antara Pembinaan Teritorial TNI dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi risiko stunting serta kaitannya dengan penguatan ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara komprehensif, serta menganalisis hubungan antaraktor, kebijakan, dan implementasi program secara kontekstual. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan aplikatif dalam mendukung perumusan strategi kebijakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu wilayah strategis dalam program ketahanan pangan nasional sekaligus lokus prioritas penanganan stunting. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, namun masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah juga menjadi wilayah yang menunjukkan adanya implementasi nyata sinergi antara TNI melalui satuan kewilayahan (Kodim, Lanal, dan Lanud) dengan Pemerintah Daerah dalam program ketahanan pangan dan intervensi stunting.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi, dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder seperti laporan resmi pemerintah, data statistik stunting (SIGIZI Terpadu/SSGI), dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan kegiatan instansi terkait, publikasi media, dan dokumen program TNI serta Pemerintah Daerah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung analisis terhadap sinergi program dan implementasinya di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Stunting

Sinergi antara TNI melalui Pembinaan Teritorial dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tingkat efektivitas yang semakin menguat dalam mendukung mitigasi risiko stunting. Hal ini tercermin dari tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya berdasarkan data SIGIZI Terpadu. Penurunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan multipihak yang secara simultan melaksanakan intervensi gizi, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lebih mampu menjawab kompleksitas permasalahan stunting dibandingkan pendekatan sektoral yang cenderung parsial dan terfragmentasi.

Secara teoritis, kondisi tersebut selaras dengan pandangan Stephen R. Covey (1989) yang menyatakan bahwa sinergi merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur yang saling melengkapi sehingga menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan kerja individual. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator dan pengelola kebijakan,

sementara TNI melalui aparat teritorial berfungsi sebagai akselerator implementasi di lapangan. Kombinasi ini menciptakan efek leverage yang signifikan, terutama dalam menjangkau kelompok sasaran hingga tingkat rumah tangga, yang seringkali menjadi titik lemah dalam implementasi program pemerintah.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, efektivitas sinergi tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural, terutama dalam hal integrasi perencanaan dan evaluasi program. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing aktor masih cenderung berbasis program sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan lintas sektor yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi yang terbangun masih berada pada level operasional, belum mencapai level strategis sebagaimana dikemukakan oleh Charles Hampden-Turner, yang menekankan pentingnya integrasi aktivitas untuk menghasilkan inovasi dan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sinergi TNI dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif dalam mitigasi stunting, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, koordinasi formal, serta integrasi kebijakan berbasis data. Tanpa penguatan tersebut, sinergi berpotensi stagnan pada level implementatif dan belum mampu menghasilkan transformasi sistemik yang berkelanjutan dalam penurunan stunting.

Peran Pembinaan Teritorial dalam Penguatan Ketahanan Pangan Lokal

Pembinaan Teritorial (Binter) TNI memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai fondasi utama dalam mitigasi risiko stunting. Melalui pendekatan kewilayahan, TNI mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan spesifik di setiap wilayah, kemudian mengintervensinya melalui kegiatan yang bersifat aplikatif seperti pendampingan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pengembangan produksi pangan lokal. Peran ini menjadi sangat penting terutama di wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur dan sumber daya, di mana kehadiran aparat teritorial mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.

Dalam perspektif teoritis, peran tersebut sejalan dengan konsep Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bertujuan memberdayakan potensi wilayah pertahanan secara menyeluruh. Selain itu, jika dikaitkan dengan Teori Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam aspek kesejahteraan yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas nasional.

Lebih lanjut, kegiatan seperti pompanisasi, Perluasan Areal Tanam (PAT), dan pemberdayaan petani lokal menunjukkan bahwa Binter mampu menciptakan multiplier effect yang signifikan, baik dalam peningkatan produksi pangan maupun dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan Binter adalah keberlanjutan program dan integrasi dengan kebijakan daerah. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat antara program TNI dan Pemerintah Daerah, upaya yang dilakukan berpotensi berjalan secara parsial dan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi yang lebih terstruktur agar peran Binter dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan mitigasi stunting.

Integrasi Program Gizi dan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Sinergi

Integrasi antara program gizi dan ketahanan pangan merupakan elemen kunci dalam mitigasi stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Selama ini, pendekatan yang dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan aspek produksi pangan dengan konsumsi gizi masyarakat melalui berbagai program seperti B2SA, pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi berbasis komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak lagi bersifat kuratif, tetapi telah bergeser ke arah preventif dan promotif yang lebih berkelanjutan.

Secara teoritis, integrasi ini sejalan dengan konsep sinergi yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antaraktor. Najianti dalam Rahmawati dkk. (2018) menyatakan bahwa sinergi yang efektif hanya dapat terwujud apabila terdapat komunikasi yang intensif dan koordinasi yang terstruktur. Dalam konteks ini, keberhasilan integrasi program sangat bergantung pada kemampuan aktor dalam menyelaraskan tujuan, strategi, dan pelaksanaan program secara bersama.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih menghadapi kendala dalam hal sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor. Perbedaan data antarinstansi serta keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi capaian penurunan stunting.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem integrasi data dan koordinasi program berbasis wilayah agar sinergi yang terbangun dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan integrasi yang baik, program gizi dan ketahanan pangan dapat saling memperkuat dan

menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan risiko stunting secara berkelanjutan.

Sinergi sebagai Implementasi Sistem Pertahanan Semesta

Sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi stunting dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nyata dari Sistem Pertahanan Semesta, di mana seluruh komponen bangsa dilibatkan dalam menghadapi ancaman, termasuk ancaman nonmiliter. Dalam konteks ini, stunting dan kerawanan pangan dipandang sebagai ancaman strategis yang dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya berdampak pada ketahanan nasional.

Konsep ini sejalan dengan teori pertahanan semesta yang menekankan bahwa pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam mitigasi stunting merupakan bagian dari perluasan fungsi pertahanan dalam menghadapi ancaman multidimensional.

Dalam praktiknya, sinergi ini terlihat dari keterlibatan TNI dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan program gizi, serta penguatan ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi pertahanan semesta di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor agar sinergi yang terbangun dapat berjalan secara optimal dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan nasional.

Analisis Sinergi dalam Perspektif DIME (*Diplomatic, Informational, Military, Economic*)

Sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mitigasi stunting dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka DIME (*Diplomatic, Informational, Military, Economic*). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana berbagai instrumen kekuatan nasional dapat diintegrasikan dalam menghadapi permasalahan multidimensional seperti stunting.

Menurut Edward Hallett Carr (1939), kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi dan opini publik. Dalam konteks ini, aspek militer tercermin melalui peran TNI dalam Pembinaan Teritorial, aspek ekonomi melalui

penguatan ketahanan pangan, serta aspek informasi melalui edukasi gizi dan komunikasi publik.

Selain itu, aspek diplomatik tercermin dalam bentuk kerja sama dan koordinasi antarinstansi, baik antara TNI, Pemerintah Daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Integrasi keempat aspek ini menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional.

Namun demikian, implementasi DIME di tingkat daerah masih belum sepenuhnya optimal karena belum adanya kerangka integrasi yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi berbasis DIME agar sinergi yang terbangun dapat lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan penurunan stunting.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, sinergi antara Pembinaan Teritorial TNI dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dalam mitigasi risiko stunting telah menunjukkan kontribusi yang nyata dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Kolaborasi ini mampu mengintegrasikan peran TNI sebagai pelaksana pembinaan kewilayahan yang menjangkau hingga tingkat akar rumput dengan peran Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dan penyelenggara program pembangunan. Sinergi tersebut terbukti memperkuat implementasi intervensi gizi dan ketahanan pangan melalui berbagai program seperti pendampingan masyarakat, pemberdayaan lahan produktif, distribusi bantuan gizi, serta edukasi konsumsi pangan bergizi, yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting di wilayah tersebut.

Namun demikian, sinergi yang terbangun masih belum sepenuhnya optimal karena menghadapi kendala dalam hal koordinasi lintas sektor, integrasi program, serta sinkronisasi data antarinstansi. Pelaksanaan kegiatan masih cenderung parsial dan belum terwadahi dalam suatu sistem kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sinergi telah berjalan pada level operasional, namun belum sepenuhnya mencapai level strategis yang mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dan sistemik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi melalui pembentukan mekanisme koordinasi formal, integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor, serta pengembangan sistem data terpadu yang akurat dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi peran aparat teritorial TNI dalam mendukung program ketahanan pangan dan intervensi gizi perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah. Dengan sinergi

yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan, upaya mitigasi risiko stunting tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR REFERENSI

- Carr, E. H. (1939). *The twenty years' crisis 1919-1939: An introduction to the study of international relations*. Macmillan.
- Covey, S. R. (1989). *The 7 habits of highly effective people*. Free Press.
- Deardorff, D. K., & Williams, M. R. (2008). *Synergy and organizational effectiveness*. Routledge.
- Firmansyah. (2016). *Manajemen strategi dan konsep sinergi organisasi*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Penguatan ketahanan pangan berbasis maritim*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Strategi nasional percepatan penurunan stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang pembinaan teritorial*. Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Program perluasan areal tanam dan ketahanan pangan nasional*. Kementerian Pertanian RI.
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., & Adji, A. (2024). Long-term effects of childhood stunting on adult outcomes: Evidence from Indonesia. *BMJ Open*, 14(9), e089531. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-e089531>
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Modul bidang studi ketahanan nasional*. Lemhannas RI.
- Najianti. (2018). Sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam Rahmawati et al., *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2024). *Laporan program penurunan stunting Kabupaten Lombok Tengah*. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- SIGIZI Terpadu. (2026). *Data prevalensi stunting Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2025*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.